

BAB I PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Kemiskinan berkaitan dengan kualitas sumber daya manusia. Kemiskinan disebabkan oleh karena sumber daya manusia yang tidak berkualitas, dan peningkatan SDM (sumber daya manusia) merupakan salah satu solusi penanggulangan kemiskinan. Secara ekonomi, kemiskinan didefinisikan sebagai kurangnya sumber daya untuk meningkatkan kesejahteraan penduduk. Kemiskinan Merupakan masalah kompleks yang masih dihadapi Indonesia hingga saat ini, menggambarkan keadaan kepemilikan yang tidak adil dan pendapatan yang rendah, atau secara lebih detail ketidakmampuan untuk memenuhi dasar manusia, yaitu pangan (makanan), papan (tempat tinggal), dan sandang (pakaian). Beberapa definisi menggambarkan ketidakadaan ini, salah satunya adalah definisi yang digunakan BPS, yang menggambarkan kemiskinan sebagai ketidakmampuan individu untuk memenuhi kebutuhan dasar minimal untuk hidup layak (BPS, 2005).

Salah satu faktor penting pendukung strategi penanggulangan kemiskinan adalah tersedianya data kemiskinan yang akurat. Dengan data yang tersedia, pemerintah dapat memutuskan bagaimana mengurangi kemiskinan. Selain itu, data yang tersedia dapat memungkinkan pemerintah untuk membandingkan tingkat kemiskinan dari tahun ke tahun. Sejalan dengan penyajian data dan persentase penduduk miskin, informasi yang tidak kalah pentingnya adalah profil kemiskinan. Informasi yang tidak kalah pentingnya mengenai profil kemiskinan, baik dari segi penyajian data maupun persentase penduduk miskin (Vita, 2018). Di Indonesia jika dilihat dari data Nasional persentase garis kemiskinan menurut daerah dan komponen pada Tahun Maret 2021 - Maret 2022 (Rp/Kapita/Bulan). Daerah, perkotaan, pedesaan, dan perkotaan pedesaan, menurut garis kemiskinan makanan (GKM), non makan (GKNM), total (GK) yang tiap tahun terus meningkat. Indonesia yang sulit lepas dari lingkaran garis kemiskinan membuat pemerintah daerah untuk terus berupaya melakukan pengentasan kemiskinan di Indonesia.

Berdasarkan perkembangan tingkat kemiskinan 2021 – 2022 dapat dilihat pada tabel 1.1, garis kemiskinan terus mengalami peningkatan terhitung pada Maret 2021 – Maret 2022. Garis kemiskinan nasional mengalami peningkatan, baik di wilayah perkotaan maupun pedesaan. Garis kemiskinan nasional meningkat sebesar 6,97% dari Rp 472.525,00 per kapita per bulan pada Maret 2021, menjadi Rp 505.469,00 per kapita per bulan Maret 2022. Sementara itu, garis kemiskinan di wilayah perkotaan naik sebesar (6,46%), dan di wilayah pedesaan naik sebesar (7,56%) (BPS, 2022).

Tabel 1. 1
Garis Kemiskinan Menurut Daerah dan Komponen Maret 2021-Maret 2022
(Rp/Kapita/Bulan)

Daerah/Tahun	Garis Kemiskinan		
	Makanan (GKM)	Non-Makanan (GKNM)	Total (GK)
(1)	(2)	(3)	(4)
Perkotaan			
Maret 2021	353 767	136 081	489 848
Maret 2022	377 958	143 536	521 494
Pedesaan			
Maret 2021	344 277	105 908	450 185
Maret 2022	370 096	114 113	484 209
Perkotaan + Pedesaan			
Maret 2021	349 474	123 051	472 525
Maret 2022	374 455	131 014	505 469

Sumber : BPS Penghitungan Dan Analisis Kemiskinan Makro Indonesia 2022

Indonesia saat ini masih negara berkembang belum dapat dikatakan negara yang maju hal ini disebabkan sumber daya manusia (SDM) di Indonesia yang masih tergolong rendah serta terdapat ketimpangan yang terjadi di Indonesia hal ini

menyebabkan meningkatnya angka kemiskinan Provinsi/Kota di Indonesia. Indonesia memiliki 34 provinsi salah satunya Daerah Istimewa Yogyakarta dengan Ibu Kota Yogyakarta, Persentase penduduk miskin (P0) menurut Provinsi dan Kota tahun 2020 – 2022 DIY menempati peringkat ketiga di Indonesia dengan jumlah penduduk miskin yang tinggi. Adapun Kabupaten Bantul merupakan kategori wilayah termiskin di Provinsi DIY dengan menempati peringkat ketiga.

Berdasarkan Badan Pusat Statistik (BPS) Kabupaten Bantul persentase Penduduk miskin Tahun 2020 (138,66) ribu Tahun 2021 (146,98) ribu dan tahun 2022 (130,13) ribu yang artinya penduduk miskin di Kabupaten Bantul tahun 2021 mengalami peningkatan kemiskinan namun pada tahun 2022 penduduk miskin di Kabupaten Bantul Menurun persentase penduduk miskin. Menurut pengumpulan Data Focus Group Discussion (FGD) Usaha Mikro berkontribusi 30,25% untuk produk domestik bruto yang sebagian besar dilakukan oleh perempuan, kepala rumah tangga yang berusaha sendiri sebesar 37,91% yang sebagian besar dibandingkan laki – laki sebesar 22,34% dan perempuan yang berusaha sendiri di Usaha Mikro (<https://bit.ly/DataDP3AP2>). Proyeksi penduduk adalah perhitungan ilmiah yang didasarkan pada asumsi dari komponen-komponen laju pertumbuhan penduduk yang meliputi, kelahiran, kematian dan perpindahan (migrasi). Dari ketiga komponen tersebut yang menentukan jumlah dan struktur umur penduduk di masa depan, untuk itu dalam menentukan masing – masing asumsi diperlukan data yang menggambarkan trend dimasa lampau hingga saat ini, faktor – faktor yang mempengaruhi tiap komponen dan hubungan satu dengan yang lain. Berdasarkan Hasil Proyeksi Penduduk Kabupaten/Kota Provinsi D.I Yogyakarta tahun 2010 – 2020, jumlah Penduduk DIY tahun 2017 tercatat 3.762.167 jiwa, dengan jumlah persentase jumlah penduduk laki-laki 49,46% dan penduduk perempuan 50,54% (*Buku Pedoman Desa Prima*). Hasil persentase penduduk miskin di Provinsi D.I.Y berdasarkan Kabupaten/Kota selama 3 tahun terakhir yaitu, terhitung dari tahun 2020 Kabupaten Bantul menempati peringkat kedua dengan persentase (138,66) ribu, tahun 2021 mengalami peningkatan menjadi (146,98) ribu, dan tahun 2022 persentase penduduk

miskin di Bantul menurun menjadi (130,13) ribu. Dapat dilihat pada tabel 1.2 (BPS, 2020).

Tabel 1. 2
Jumlah Penduduk Miskin Menurut Kabupaten/Kota

Kabupaten/Kota	Persentase Penduduk Miskin (Ribuan)		
	2020	2021	2022
DI Yogyakarta	475,72	506,45	454,76
Kulonprogo	78,06	81,14	73,21
Bantul	138,66	146,98	130,13
Gunungkidul	127,61	135,33	122,82
Sleman	99,78	108,93	98,92
Yogyakarta	31,62	34,07	29,68

Sumber : BPS Provinsi D.I Yogyakarta

Dari data diatas menunjukkan persentase jumlah penduduk miskin tertinggi di Provinsi DIY, Kota D.I Yogyakarta menempati peringkat ke satu, Kabupaten Bantul menempati peringkat ke dua, Kabupaten Gunungkidul menempati peringkat ke tiga, Kabupaten Sleman menempati peringkat ke empat, Kabupaten Kulonprogo menempati peringkat ke lima ,dan Kota Yogyakarta menempati peringkat ke enam, jika dilihat 3 tahun terakhir Kabupaten Bantul mengalami peningkatan penduduk miskin tahun 2021 namun pada tahun 2022 mengalami penurunan penduduk miskin. Desa Dlingo wilayah terletak di Kecamatan Dlingo Kabupaten Bantul , Daerah Istimewa Yogyakarta. Desa Dlingo terdapat cakupan wilayah 10 Dusun meliputi: Dusun Koripan 1, Dusun Koripan 2, Dusun Pokok 1, Dusun Pokoh 2, Dusun Dlingo 1, Dusun Dlingo 2, Dusun Kebosungu 1, Dusun Kebosungu 2, Dusun Pakis 1, dan Dusun Pakis 2. Berdasarkan hasil observasi awal sebagaimana hasil wawancara bersama Bapak Turyadi A.Md, Desa Dlingo memiliki jumlah penduduk 5.866 (2076 KK) jumlah penduduk laki – laki 2.904 jiwa dan jumlah penduduk perempuan 2.962

jiwa dengan mata pencaharian penduduk, petani 418 jiwa, karyawan swasta 196 jiwa, PNS 71 jiwa, pensiunan 65 jiwa, wiraswasta 445 jiwa, perdagangan 48 jiwa, buruh 700 jiwa, dan tukang kayu 15 jiwa. Pemerintah Kabupaten Bantul tidak hanya terdapat program Desa Prima, namun adanya program PKH dan BPNT. Jika dilihat dari penerima PKH (Program Keluarga Harapan) dan bantuan berupa uang non tunai kepada RTSM (Rumah Tangga Sangat Miskin terdapat 684 warga Desa Dlingo yang menerima PKH, dan bantuan BPNT (Bantuan Pangan Non Tunai) diberikan kepada keluarga penerima manfaat (KPM) keluarga dengan kondisi sosial ekonomi 25% di daerah pelaksanaan yang mana terdapat 798 warga Desa Dlingo yang menerima BPNT, kemudian menurut Data Kemiskinan Ekstrem tahun 2022 Kelurahan Dlingo terdapat 106 warga yang masuk kategori kemiskinan terparah.

Usaha penanggulangan kemiskinan dilakukan Pemerintah Daerah D.I Yogyakarta diantaranya dengan menekan pertumbuhan dan sekaligus mengurangi penduduk miskin sebagai prioritas pertama dalam pembangunan di Daerah Istimewa Yogyakarta. Melalui DP3AP2 DIY Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak Dan Pengendalian Penduduk untuk menekan angka kemiskinan dengan mengoptimalkan program Desa Prima (Perempuan Indonesia Maju Mandiri). Maka dari itu upaya menanggulangi kemiskinan melalui ekonomi dengan mengidentifikasi dan manfaat seluruh potensi baik Sumber Daya Alam (SDA) maupun Sumber Daya Manusia (SDM). Program Desa Prima merupakan program untuk meningkatkan partisipasi kaum perempuan dalam satu wilayah melalui produktivitas ekonomi agar tercipta kehidupan yang lebih baik, yang menjadi sasaran Program Desa Prima adalah perempuan dari keluarga miskin di wilayah – wilayah yang dianggap berpotensi dan memiliki tingkat kemiskinan yang tinggi (DP3AP2 DIY, 2019).

Desa Prima (Perempuan Indonesia Maju Mandiri) merupakan Program Pemerintah DIY melalui Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak Dan Pengendalian Penduduk untuk menekan angka kemiskinan. Sasaran Program Desa Prima perempuan dari keluarga miskin dan wilayah yang berpotensi memiliki tingkat kemiskinan yang tinggi, melalui Pemberdayaan Kelompok Desa Prima berdasarkan

(Keputusan, Lurah Dlingo Tentang Pemberdayaan Desa Prima Nomor 35 Tahun 2022) 1) Melaksanakan kegiatan pemberdayaan kelompok 2) Mempertanggungjawabkan secara benar dan profesional pelaksanaan kegiatan dimaksud sesuai peraturan yang berlaku. Salah satu upaya Pemerintah Kelurahan Dlingo dalam menekan angka kemiskinan adalah dengan mengoptimalkan Program Desa Prima melalui Pemberdayaan Kelompok Desa Prima. Kelompok Desa Prima Dlingo yang sudah dibentuk pada tahun 2016 – 2023 yang diikuti oleh sembilan Dusun dengan jumlah 29 Anggota. Berikut jenis usaha kelompok Desa Prima “Giri Prima Tama” Dlingo meliputi 29 jenis usaha yaitu: Wedang kekep & empon, Gresel (jual beli pisang), keripik tempe, aneka keripik pisang, produksi tempe, ternak ayam, tas kain perca dan beberapa jenis usaha lainnya.

Berdasarkan keterangan Bapak Turyadi A.Md yang merupakan kepala bagian Kesejahteraan Sosial di Kelurahan Dlingo dan Ibu Sugimah Ketua Kelompok Desa Prima “Giri Prima Tama” didapatkan beberapa hambatan terkait Implementasi Program Desa Prima di Desa Dlingo diantaranya: *Rendahnya kualitas Sumber Daya Manusia (SDM) yang mempengaruhi tingkat produktivitas kerja yang mana rata rata anggota kelompok “Giri Prima Tama” Desa Dlingo dengan rentan usia 40 tahun sampai 60 tahun keatas serta pendidikan yang diperoleh hanya tingkat Pendidikan Sekolah Dasar (SD) dan Sekolah Menengah Pertama (SMP), pendidikan memiliki peran penting dalam peningkatan SDM ke arah yang lebih baik yang mana mampu membentuk keterampilan , kecerdasan intelektual agar dapat menjadi lebih kreatif* (Wawancara 20, Januari 2023). dalam penelitian ini peneliti menggunakan model teori implementasi kebijakan dari Van Meter dan Van Horn (1975) yang menetapkan beberapa variabel meliputi : standar dan sasaran kebijakan, kinerja kebijakan, sumber daya, komunikasi antar badan pelaksana, karakteristik badan pelaksana, lingkungan sosial, dan sikap pelaksana yang diyakini dapat mempengaruhi implementasi dan kinerja kebijakan.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian pada latar belakang di atas, maka didapatkan suatu rumusan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana Implementasi Program Desa Prima sebagai Upaya Pengentasan Kemiskinan Di Desa Dlingo Kabupaten Bantul?
2. Faktor Penghambat dan Pendukung dalam Implementasi Program Desa Prima di Desa Dlingo Kabupaten Bantul?

1.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah diatas, penelitian ini memiliki tujuan dan manfaat sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui bagaimana implementasi program Desa Prima sebagai upaya pengentasan di Desa Dlingo Kabupaten Bantul.
2. Untuk mengetahui faktor penghambat dan Pendukung dalam Implementasi Program Desa Prima di Desa Dlingo Kabupaten Bantul.

1.4 Manfaat Penelitian

Adapun dalam penelitian ini memiliki beberapa manfaat yang terdiri dari manfaat teoritis dan praktis, diantaranya:

1. Manfaat Teoritis
 - a. Dalam penelitian ini diharapkan mampu memberikan penjelasan dan kontribusi terhadap ilmu dan pengetahuan dalam bidang ilmu pemerintahan khususnya implementasi program Desa Prima.
 - b. Sebagai bahan kajian dalam implementasi kebijakan untuk penelitian sejenisnya
2. Manfaat Praktis
 - a. Bagi Penulis
Dalam penelitian ini diharapkan dapat menambah pengetahuan dan wawasan mengenai ilmu pemerintahan khususnya dalam implementasi kebijakan pada program Desa Prima.
 - b. Bagi Kelompok Desa Prima

Sebagai evaluasi bagi pengurus Kelompok Desa Prima “Giri Prima Tama” di Desa Dlingo dalam meningkatkan pemberdayaan ekonomi perempuan miskin.

c. **Bagi Objek Penelitian**

Sebagai bahan masukan dan pertimbangan untuk Pemerintah Kelurahan Dlingo dalam mengambil kebijakan terkait implementasi Program Desa Prima sejauh mana dampak dan manfaat yang diperoleh masyarakat dari rencana yang telah dilaksanakan.

1.5 Sistematika Penulisan

Adapun Susunan penulisan yang dilakukan oleh penulis dalam penelitian ini antara lain:

BAB I Pendahuluan

Bab 1 Pendahuluan berisi tentang latar belakang penelitian, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian dan sistematika penulisan bab

BAB II Tinjauan Pustaka

Bab 2 Tinjauan Pustaka berisi Landasan Teoritis dan penelitian terdahulu

BAB III Metodologi Penelitian

Bab 3 Metodologi Penelitian berisi tentang desain penelitian, metode pengumpulan data dan teknik analisis data penelitian

BAB IV Analisis dan Pembahasan

Bab 4 Hasil Penelitian dan Pembahasan berisi uraian tentang hasil analisis dan hasil pencarian masalah yang relevan dengan teori dan metode penelitian yang digunakan

BAB V Penutup

Bab 5 Penutup berisi kesimpulan dari hasil penelitian